

BAB I

Pendahuluan

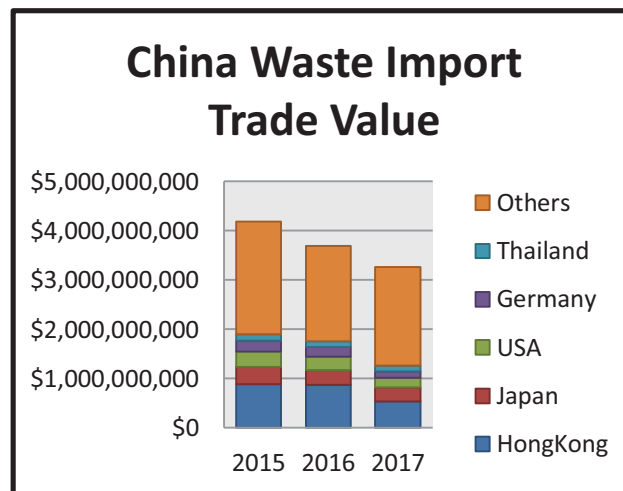
1.1. Latar Belakang Masalah

Tiongkok melalui *Ministry of Environmental Protection of the People's Republic of China* (MEP) secara resmi menotifikasi kepada WTO pada 18 Juli 2017, mereka mengeluarkan kebijakan larangan impor limbah padat yang diimplementasikan mulai tanggal 1 Januari 2018 (WTO). Kebijakan ini disahkan pada tanggal 10 Agustus 2017, melalui Pengumuman Bersama No.39, 2017 yang disusun oleh MEP, MOFCOM, GACC, *National Development and Reform Commission of China*, dan *General Administration of Quality Supervision, Inspection & Quarantine* (ETCN, 2017). Terdapat 24 empat macam sampah yang akan dilarang. Mereka menyebutkan bahwa pemerintah Tiongkok telah menemukan limbah kotor hingga limbah berbahaya yang dicampur pada limbah padat yang dapat digunakan sebagai bahan baku dalam perindustrian mereka. Kebijakan ini dikeluarkan untuk melindungi kepentingan lingkungan dan kesehatan masyarakat Tiongkok.

Impor sampah dilakukan oleh Tiongkok digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka akan bahan baku. Bahan baku yang dihasilkan dari proses daur-ulang memiliki biaya yang jauh lebih murah dibandingkan membuat bahan baku dari awal. Ketika harga komoditas dan energi melonjak tinggi, mengimpor sampah menjadi opsi yang lebih menguntungkan. Beiiringan dengan pertumbuhan industri di Tiongkok, impor sampah pun juga tumbuh hingga sepuluh kali lipat, dari 4.5 juta ton menjadi 45 juta ton, pada tahun 1995 dan 2016. Tetapi impor sampah yang dapat didaur-ulang sering kali kotor, disortir dengan buruk dan hingga terkontaminasi dengan bahan berbahaya, seperti pada tahun 1996, pabrik-pabrik di Xinjiang secara tidak sengaja

mengimpor lebih dari 100 ton logam radioaktif dari Kazakhstan. Tidak jarang pula ketika bahan yang dimaksudkan diimpor sering didaur-ulang secara tidak benar (The Economist, 2017).

Berdasarkan data dari UN Comtrade, Tiongkok telah mengimpor sampah dengan total nilai USD\$11 miliar sejak tahun 2015 hingga 2017. Sebagian besar, Tiongkok mengimpor sampah dari Hong Kong, yang mana sebenarnya menjadi tempat persinggahan impor sampah dari seluruh dunia untuk disortir dan diekspor kembali ke Tiongkok daratan. Lalu, Jepang juga menjadi negara yang mengekspor sampah ke Tiongkok terbesar kedua di dunia. Diikuti dengan Amerika Serikat, Jerman, Thailand dan negara-negara lain di dunia yang memenuhi impor sampah Tiongkok.



Sumber: UN Comtrade

Usaha Tiongkok dalam menanggulangi permasalahan impor sampah dapat dilihat sejak Februari 2013, yang mana pemerintah mengeluarkan *Operation Green Fence* (OGF) yang berlaku selama 10 bulan. Operasi khusus ini memiliki dua tujuan utama: pertama, untuk memerangi penyelundupan ilegal barang terlarang yang tercantum dalam “*Catalogue of Solid Wastes Forbidden to Import*”; kedua, untuk mencegah impor *recycle* dan limbah padat yang tidak sesuai dengan peraturan, terkait dalam hal penyelundupan, menyembunyikan, pelaporan palsu, dan penggunaan lisensi orang lain dan sebagainya (Sun, 2019). Menurut ISWA dalam The Guardian

(2013), pada tiga bulan pertama kontainer menumpuk karena 55 pengiriman dihentikan dan 7.600 ton bahan *recycle* ditolak. Hingga akhir Agustus 2013, diperkirakan lebih dari 800.000 ton impor sampah telah ditolak sejak Februari melalui OGF. Selain itu, pemerintahan Tiongkok telah menangguhkan lisensi impor 247 perusahaan (The Guardian, 2013). Pada 2015, MEP memulai aksi dua bulan, dari 1 November 2015 hingga 31 Desember 2015, yang bertujuan untuk membantu *Costoms Anti-Smuggling Bureau* negara dalam memperkuat regulasi impor sampah plastik rongsokan (Bureau of International Recycling, 2015).

Keseriusan pemerintah Tiongkok dalam permasalahan impor sampah ini disampaikan secara langsung pada saat konferensi pers yang diadakan oleh MEP bulan Juli 2017. Guo Jing, sebagai Direktur Jenderal Departemen Internasional Kerjasama MEP, menyatakan bahwa:

“Komite Sentral dan State Council sangat mementingkan pengelolaan limbah padat yang diimpor karena menyangkut perlindungan ekologi dan lingkungan. Pada bulan April ini, Presiden Xi secara khusus menyerukan pertemuan untuk membahas dan menyetujui ‘Reform Plan to Ban Waste Imports’. Pertemuan tersebut menekankan perlunya penyempurnaan sistem pengelolaan limbah padat impor untuk keamanan lingkungan ekologi nasional dan kesehatan masyarakat kita.”

Selain permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh impor sampah, pemerintah Tiongkok juga berusaha dalam meningkatkan industri manufaktur *high-end*. Pada tahun 2016, pemerintah Tiongkok mengeluarkan “13th Five-Year Plan”. Pada dokumen ini pemerintah Tiongkok berusaha dalam pengembangan industri manufaktur, yang mana salah satu kunci utamanya adalah meningkatkan kualitas bahan baku yang digunakan dalam industri manufaktur. Selain itu dokumen ini juga memaparkan tujuh *new strategic industry* yang salah satunya adalah *new*

material industry, yang mana berfokus dalam penelitian dan pengembangan material-material yang berkualitas tinggi. Pengembangan industri manufaktur berkualitas tinggi makin diintensifikasi dengan dikeluarkannya strategi “*Made in China 2025*”. Dengan strategi ini, Tiongkok bertujuan untuk menghilangkan anggapan sebagai “*world’s factory*” yang mana memiliki biaya produksi murah dikarenakan kualitas barang yang rendah dan biaya pekerja yang murah. Strategi ini memiliki arahan prinsipal untuk manufaktur yang lebih *innovation-drive*, memfokuskan kualitas dibandingkan kuantitas, mencapai pembangunan hijau, mengoptimalisasi struktur industri Tiongkok, dan menumbuhkan bakat manusia (Kennedy, 2015).

Seluruh tindakan tegas Tiongkok dalam memerangi sampah impor secara langsung berdampak buruk bagi sebagian masyarakat mereka. Terdapat sekitar 15 juta penduduk yang dipekerjakan dalam industri *recycle* pada tahun 2016. Sejak Tiongkok mengumumkan larangan impor sampah pada tahun 2017, terdapat sekitar 3 juta orang yang kehilangan pekerjaan mereka dalam industri *recycle* ini. Pemerintah Tiongkok sendiri berencana untuk mengeluarkan rencana larangan impor sampah secara keseluruhan, yang mana seluruh jenis sampah asing akan dilarang pada tahun 2050, dan menggantinya dengan sampah domestik. Namun, banyak dari pelaku dan pengusaha industri *recycle* di Tiongkok lebih memilih sampah asing dibandingkan sampah domestik. Menurut mereka sampah asing memiliki kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan sampah domestik (Hook dan Reed, 2018). Penjelasan diatas kemudian membuat peneliti mempertanyakan lebih dalam alasan dibalik kebijakan larangan impor sampah ini dikeluarkan. Kebijakan ini memang diharapkan dapat melindungi lingkungan dan masyarakat Tiongkok. Tetapi, kebijakan ini juga dapat menimbulkan dampak negatif dalam perkembangan ekonomi negara, yang selama ini menjadi prioritas mereka.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan atas latar belakang di atas, menjadi dasar di munculnya pernyataan yaitu, mengapa Tiongkok yang sejak tahun 1990-an hingga tahun 2017 menjadi negara pengimpor sampah terbesar di dunia, memutuskan untuk bertransformasi dengan mengeluarkan kebijakan pelarangan impor sampah?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu alasan dibalik kebijakan pelarangan impor sampah Tiongkok. Berdasarkan latar belakang yang telah dilampirkan diatas, Tiongkok merupakan pengimpor sampah terbesar di dunia sejak tahun 1990-an. Sampah impor yang didaur ulang menjadi bahan utama dalam perindustrian manufaktur mereka. Kebijakan ini mengindikasikan bahwa terdapat target perubahan yang ingin dicapai oleh Tiongkok.

1.4. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian berikut, penulis berusaha menganalisa alasan Tiongkok mengeluarkan kebijakan larangan impor sampah. Pertama, penulis menggunakan kerangka pemikiran Transformasi Industri Berkelanjutan untuk menjelaskan mengapa kebijakan larangan impor sampah dikeluarkan. Kedua, penulis menggunakan kerangka pemikiran Kepemimpinan dalam Isu Lingkungan Global melalui Difusi Kebijakan.

1.4.1. Transformasi Industri

Hubungan antara industrialisasi dan dampaknya terhadap lingkungan telah menarik perhatian serius pemerintah nasional dan organisasi internasional. Keberlanjutan dalam produk, proses, dan layanan semakin ditekankan dengan menempatkan lingkungan sebagai pusat dari beberapa transformasi industri, atau setidaknya setara dengan daya saing. Kunci keberlanjutan lingkungan

diakui sejak awal karena melibatkan desain dan implementasi produk, proses, dan layanan yang ramah lingkungan, daripada menangani masalah lingkungan sebagai renungan dalam sistem industri (Ashford et al, 2007).

Terdapat perbedaan dalam melihat pembangunan berkelanjutan hanya sebagai masalah lingkungan, atau sebagai alternatif sebagai tantangan multidimensi dalam tiga dimensi: lingkungan, ekonomi, dan sosial. Lingkungan, lapangan kerja, dan daya saing adalah dimensi keberlanjutan yang penting secara operasional, dan ketiga dimensi ini bersama-sama mendorong pembangunan berkelanjutan di sepanjang jalur yang berbeda dan menuju ke tempat yang berbeda dari sekadar kepedulian yang didorong oleh lingkungan, yang mungkin memerlukan pengorbanan, misalnya, antara perbaikan lingkungan. dan pekerjaan. Agenda pembangunan berkelanjutan, hampir secara definisi, merupakan salah satu perubahan sistem. Ini jangan disamakan dengan agenda kebijakan lingkungan, yang – atau seharusnya – secara eksplisit berbasis efek, dan berasal dari itu, program kebijakan dan undang-undang yang diarahkan pada perbaikan lingkungan, dengan mengandalkan tujuan dan kondisi tertentu. Agenda kebijakan pembangunan berkelanjutan berfokus setidaknya pada proses (misalnya, terkait dengan manufaktur, transportasi, energi, konstruksi, dan sebagainya), dan dapat meluas ke lebih banyak perubahan sistem teknologi lintas sektoral (Ashford et al, 2007).

Agenda kebijakan berkelanjutan adalah kebijakan yang berfokus pada perubahan teknologi yang mengubah cara barang dan jasa disediakan, pencegahan polusi dan penurunan penggunaan energi dan sumber daya melalui perubahan sistem yang lebih luas, dan pengembangan sistem sosio-teknis baru. Melibatkan elemen teknologi dan organisasi yang meningkatkan banyak dimensi 'pekerjaan yang berarti' melalui integrasi desain dan implementasi kebijakan. Mengundang industri untuk menjadi berkelanjutan dengan beroperasi dengan cara yang lebih modern dan

tercerahkan dapat menjadi tambahan yang layak untuk gagasan tata kelola konvensional. Tetapi mengandalkan hanya atau terutama pada industri yang ada untuk transformasi yang berkelanjutan mengabaikan semakin banyak bukti bahwa bukan hanya kemauan dan peluang yang diperlukan untuk perubahan tersebut, tetapi kondisi penting ketiga - kemampuan atau kapasitas perusahaan untuk berubah - sangat penting (Ashford et al, 2007).

Dalam beberapa situasi mereka mungkin melakukannya karena masyarakat atau permintaan pasar mengirimkan sinyal yang kuat, tetapi tidak di semua atau bahkan di sebagian besar kasus. Dalam hal ini, lembaga pemerintah dan masyarakat yang menghadapi tantangan rangkap tiga yang berasal dari tuntutan baru di bidang daya saing, lingkungan, dan lapangan kerja. Kebijakan pemerintah yang cerdas merupakan bagian penting untuk mendorong tanggapan yang tepat dari sistem yang sedang menghadapi tantangan (Ashford et al, 2007).

1.4.2. Kepemimpinan dalam Isu Lingkungan Global

Kepemimpinan merupakan sebuah interaksi antara dua anggota atau lebih dalam suatu kelompok yang mana melibatkan menstrukturisasi sebuah situasi dan persepsi dan ekspektasi dari para anggota (Bass, 1990). Namun, lebih dari sekedar menginstruksikan Rost (1993) melihat bahwa kepemimpinan juga bergantung pada kapasitas dari pemimpin itu sendiri. Dalam membangun definisi kepemimpinan lingkungan, Boral, Cayer, dan Baron (2009) berpendapat bahwa kepemimpinan lingkungan setidaknya harus dapat: (1) menangani kompleksitas masalah lingkungan; (2) mengintegrasikan tampaknya pandangan yang bertentangan; (3) memahami dan mengatasi harapan dari berbagai pemain; (4) secara mendalam mengubah praktik organisasi. Selain itu, kepemimpinan lingkungan juga harus dapat mempengaruhi pengikut untuk bersama-sama dan kreatif menghadapi tantangan yang ada. Ini menekankan perlunya tindakan kolektif

untuk mengatasi masalah umum seperti, perubahan iklim (Dietz, Dolsak, Ostrom, dan Stren. 2002).

Kepemimpinan identik dengan sifat yang relasional, yang mana terdapat hubungan antar aktor di dalam sebuah kelompok, yaitu antara pemimpin dan pengikut. Dalam melihat efektifitas *leadership*, terdapat beberapa factor yang mempengaruhi, antara lain: kemampuan sumber daya, legitimasi, dan kredibilitas. Menurut Christer et al (2012) terdapat tiga model *leadership*, yaitu: *Structural Leadership*, *Directional Leadership*, dan *Idea-based Leadership*. *Structural Leadership* dapat didefinisikan sebagai seorang pemimpin yang mengandalkan *power-resource* untuk menciptakan isu maupun solusi baru. Kepemimpinan yang demikian biasanya diikuti oleh upaya koersif dari aktor tersebut. *Directional Leadership* dijelaskan sebagai pemimpin yang memberikan model untuk ditiru oleh pihak lainya. Pemimpin tersebut biasanya menunjukkan komitmen untuk bertindak. Selain itu, kepemimpinan dengan model tersebut mampu membuktikan komitmennya, sehingga pengikut lainnya semakin yakin akan kepemimpinannya. *Idea-based Leadership* biasanya dikenal sebagai *entrepreneurial*, *intellectual* atau *instrumental leadership*. Pemimpin ini memiliki peran untuk *problem naming and framing* serta mempromosikan solusi untuk masalah kolektif. Jenis kepemimpinan ini ditandai dengan upaya penetapan agenda serta menemukan dan mengusulkan solusi bersama untuk masalah kolektif.

Lebih lanjut, Liefferink & Wurzel (2016) menjelaskan bahwa biasanya suatu negara dianggap sebagai *leaders* dalam isu lingkungan ketika menjadi aktor pertama yang menyebarkan atau memperkenalkan inovasi mengenai kebijakan lingkungan tertentu atau memperlihatkan tingkat ambisi tertinggi. Mereka juga menjelaskan bahwa terdapat empat posisi yang berkaitan dengan posisi suatu aktor dalam isu lingkungan, antara lain: *laggard*, *pionner*, *symbolic leader*, dan *pusher*. Kategorisasi ini didasarkan pada ambisi internal dan eksternal negara yang tinggi atau

rendah. Posisi *laggard* didefinisikan sebagai aktor yang memiliki tingkat ambisi internal yang rendah dan eksternal yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa aktor tersebut tidak memungkinkan menjadi *leader*. Kemudian posisi *pioneer* dijelaskan sebagai aktor yang mempunyai ambisi internal yang tinggi tetapi ambisi eksternal yang rendah. Aktor dengan posisi ini telah mampu untuk memimpin dirinya sendiri, namun kurang memperhatikan pihak lainnya. *Symbolic leader* merupakan posisi yang mana negara memiliki ambisi internal yang rendah dan ambisi eksternal yang tinggi. Posisi *pusher* dijelaskan sebagai aktor yang mampu mengkombinasikan antara ambisi internal dan ambisi eksternal yang tinggi. Sehingga aktor tersebut mampu menjadi *pusher* memimpin dalam negeri serta aktif untuk mendorong negara-negara lain mengikuti contohnya.

1.4.2.1. Kepemimpinan Lingkungan Melalui Difusi Kebijakan

Proses kepemimpinan lingkungan melalui difusi kebijakan dimulai dengan pengenalan kebijakan dengan karakteristik kepeloporan oleh suatu yurisdiksi atau pemerinrah. Kebijakan pelopor kemudian mempengaruhi aktor di yurisdiksi lain melalui satu atau kombinasi mekanisme difusi yaitu: pembelajaran, emulasi, dan penyesuaian (Biedenkopf, 2012). Sebagai hasil, para aktor mengubah posisi kebijakan mereka menjadi efek bahwa mereka mendukung atau secara aktif menganjurkan pengenalan kebijakan pengikut yang mirip dengan kebijakan pelopor (Biedenkopf, 2012).

Kepemimpinan lingkungan melalui difusi kebijakan dapat dilihat sebagai mode yang berbeda dari tata kelola eksternal selain mode negosiasi internasional dan tindakan koersif (Biedenkopf, 2012). Negosiasi internasional didasarkan pada harmonisasi kebijakan yang dirundingkan dan disepakati bersama. Sedangkan tindakan pemaksaan adalah tindakan sepihak yang mana suatu

pemerintahan memutuskan untuk menggunakan alat pemaksaan seperti sanksi perdagangan atau insentif. Kepemimpinan melalui difusi ini juga merupakan tindakan yang sepihak, namun berbeda dengan tindakan koersif, kepemimpinan mode ini didasari pada pengenalan langkah-langkah kebijakan yang tujuan utamanya adalah menangani situasi kebijakan di dalam batas yurisdiksi itu sendiri (Biedenkopf, 2012). Langkah kebijakan tersebut mengangkat standar perlindungan lingkungan di dalam suatu yurisdiksi merupakan langkah pertama. Kemudian langkah kedua mekanisme difusi baru dapat digunakan (Biedenkopf, 2012). Melalui tiga mekanisme: (1) pembelajaran; (2) emulasi; dan (3) penyesuaian, pemerintahan lain dapat dipengaruhi oleh kebijakan pelopor yang dapat mengarah pada peningkatan standar perlindungan lingkungan di pemerintahan masing-masing (Biedenkopf, 2012).

Kepemimpinan melalui difusi adalah cara pemerintahan eksternal yang hanya dapat dikendalikan sampai tingkat tertentu oleh pemerintahan pelopor. Mode pemerintahan ini hanya dapat sedikit didorong oleh pemerintahan pelopor. Difusi bergantung pada mekanisme dan pada faktor kontekstual dalam pemerintahan pengikut potensial. Difusi terjadi ketika aktor dalam pemerintahan pengikut potensial belajar, meniru, atau menyesuaikan diri sendiri dengan kebijakan pelopor dan sebagai konsekuensinya, mengadvokasi kebijakan pengikut yang serupa dengan kebijakan pelopor di pemerintahan mereka. Politik institusi dan persepsi masalah harus cukup mendukung agar upaya advokasi ini berhasil dan mendukung pengenalan kebijakan pengikut. Pemerintahan pelopor juga dapat mencoba menghitung efek penyesuaian potensial dalam desain kebijakan pelopornya. Hal ini merupakan sarana terbatas yang melaluinya, kepemimpinan dengan difusi dapat dibina dan diarahkan secara aktif (Biedenkopf, 2012).

Karakteristik dari sebuah pelopor merupakan hal yang baru dan pendekatan yang inovatif atau ketentuan yang melampaui kebijakan yang ada secara internal dan eksternal dengan cakupan atau

tujuan yang ambisius. Jangkauan dari apa yang dapat dianggap sebagai kebijakan pelopor sangat luas (Biedenkopf, 2012). Misalnya, sebuah pendekatan baru dalam pembuatan kebijakan, instrument kebijakan yang inovatif, target yang ambisius, atau tujuan kebijakan yang baru. Kebijakan pelopor dapat mempengaruhi yurisdiksi lain, lebih tepatnya aktor lain yang kemudian mempromosikan pengenalan kebijakan pengikut yang mirip dengan kebijakan pelopor (Biedenkopf, 2012). Apakah aktor-aktor ini berhasil atau tidak dalam upaya mereka untuk mengadvokasi kebijakan yang mirip dengan kebijakan pelopor tergantung pada faktor-faktor yang terkait dengan politik, lembaga, dan persepsi masalah kebijakan yang spesifik untuk setiap pemerintahan tertentu (Tews, 2005).

Proses difusi kebijakan dengan demikian dapat dipecah menjadi dua tahap (Biedenkopf, 2012). Langkah pertama terdiri dari mekanisme yang mana aktor dipengaruhi untuk mengubah posisi kebijakan mereka untuk mendukung pengenalan kebijakan yang serupa dengan kebijakan pelopor. Langkah kedua terdiri dari aktor faktor domestik yang menentukan apakah aktor-aktor ini berhasil dalam upaya mereka untuk mengadvokasi kebijakan pengikut (Biedenkopf, 2012).

Berbagai aktor dapat terlibat dalam proses difusi kebijakan. Aktor negara maupun non-negara dapat menjadi pendukung memperkenalkan kebijakan pengikut (Biedenkopf, 2012). Aktor dari pemerintahan pelopor, aktor internasional, dan aktor dari pemerintahan pengikut potensial dapat secara aktif mempromosikan kebijakan pelopor dan mengadvokasi pengenalan kebijakan pengikut. Organisasi internasional juga sering terlibat dalam upaya *benchmarking* dan menerbitkan laporan yang membikan analisis dan rekomendasi kebijakan, yang pada gilirannya dapat mendorong proses difusi (Biedenkopf, 2012). Dalam yurisdiksi pengikut potensial, berbagai aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan proses dapat dilibatkan dalam

mengkomunikasikan informasi tentang kebijakan pelopor dan dalam mengadvokasi opsi kebijakan yang serupa dengan kebijakan pelopor (Dolowitz dan Marsh, 2000).

Difusi kebijakan dapat terjadi pada berbagai tahap siklus kebijakan, seperti penetapan agenda, perumusan kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan (Biedenkopf, 2012). Evaluasi suatu kebijakan dapat mengarah pada pengakuan bahwa kebijakan ini memerlukan perubahan atau bahwa kebijakan baru harus diperkenalkan. Hal ini dapat menyebabkan siklus kebijakan baru yang dimulai dengan penetapan agenda. Kebijakan pelopor dapat memperoleh atau kehilangan kepentingan dalam perjalanan siklus kebijakan. Hal ini mungkin dapat menjadi penting dalam menempatkan suatu masalah dalam agenda politik suatu pemerintahan (Bennett, 1991).

1.5. Hipotesis

Melalui permasalahan dan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan, hipotesis penulis akan alasan dari kebijakan pelarangan impor sampah yang diimplementasikan oleh Tiongkok dikarenakan:

- (1). Keinginan Tiongkok untuk mentransformasi industri mereka yang berbahan dasar daur ulang sampah, menjadi industri manufaktur *high-end* yang menggunakan bahan yang lebih berkualitas tinggi.
- (2). Tiongkok ingin menjadi pemimpin dalam isu lingkungan global dengan model difusi kebijakan. Kebijakan pelarangan impor sampah ini menjadi kebijakan yang mana dapat mempengaruhi aktor-aktor internasional. Tiongkok ingin menjadi pemimpin isu lingkungan, kebijakan ini menjadi kebijakan pelopor yang mana diharapkan dapat dipelajari, diemulsi, dan disesuaikan dalam konteks dan permasalahan negara masing-masing.

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Definisi Konseptual dan Operasionalisasi Konsep

1.6.1.1. Mekanisme Difusi Kebijakan

Proses difusi kebijakan berlangsung dalam dua tahap, pertama adalah mekanisme yang mana kebijakan pelopor mempengaruhi posisi kebijakan aktor di yudiriksi pengikut potensial. Sebagai hasil dari mekanisme difusi, para aktor tersebut dapat merevisi posisi kebijakan mereka sehingga mereka dapat mengadvokasikan kebijakan yang serupa dengan kebijakan pelopor. Mekanisme tersebut adalah pembelajaran, emulasi, dan penyesuaian. Difusi dapat terjadi melalui satu, dua, atau ketiga mekanisme secara bersamaan, yang mana disetiap mekanisme tersebut secara independen memperoleh dan kehilangan kepentingannya pada berbagai tahap siklus kebijakan.

1.6.1.1.1. Pembelajaran

Pembelajaran terjadi ketika para aktor mengambil pelajaran dari kebijakan pelopor untuk mengukut apakah kebijakan yang sama atau serupa akan bermanfaat bagi yurisdiksi mereka. urutan mekanisme ini adalah pertama, para aktor dalam yurisdiksi pengikut potensial menjadi sadar akan kebijakan pelopor. Kemudian mereka mengambil pelajaran darinya sehubungan dengan kemungkinan opsi kebijakan untuk yurisdiksi mereka. hasil dari proses pembelajaran ini adalah merevisi posisi kebijakan masing-masing aktor sehingga mereka mendukung atau secara aktif mengadvokasi pengenalan kebijakan pengikut yang serupa dengan kebijakan pelopor. Melalui mekanisme pembelajaran, posisi kebijakan yang sudah ada dapat dikonfirmasi dan dikuatkan. Hal ini lah yang menyebabkan peningkatan kepercayaan aktor terhadap posisi kebijakan (Levy, 1994).

Kebijakan pelopor menghasilkan informasi dan model baru yang dapat menginformasikan para aktor dan dapat mendorong mereka untuk merevisi atau menguatkan posisi kebijakan mereka. Aktor dapat belajar dari pengalaman yurisdiksi pelopor, dapat mempelajari analisis yang dilakukan sebelum pengenalan kebijakan pelopor dan dapat mengakses informasi dan keahlian lain yang dihasilkan dalam konteks kebijakan pelopor, dapat menggunakan informasi yang dihasilkan dalam tahap implementasi kebijakan pelopor, atau dapat memanfaatkan pengetahuan yang dihasilkan melalui evaluasi kebijakan pelopor. Pada setiap tahap siklus kebijakan pelopor, informasi yang dihasilkan dapat digunakan oleh aktor yurisdiksi lain untuk menginformasikan keputusan mereka sendiri pada berbagai tahap siklus kebijakan masing-masing. Khususnya untuk masalah yang kompleks atau ketika ada tingkat ketidak pastian yang tinggi tentang konsekuensi suatu kebijakan. Para aktor biasanya cenderung beralih ke pengalaman yurisdiksi lain (Weyland, 2009).

Para akademisi umumnya membedakan dua jenis pembelajaran, yaitu pembelajaran rasional dan pembelajaran terbatas. Pembelajaran rasional mengasumsikan kapasitas analitis penuh para aktor. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa aktor mengevaluasi semua alternative untuk memutuskan solusi optimal untuk situasi tertentu. Pembelajaran terikat mengakui bahwa aktor memiliki pengetahuan yang tidak lengkap dan kapasitas analitis yang terbatas. Aktor rasional terikat mengambil jalan pintas kognitif untuk menyederhanakan pengambilan keputusan dengan menggunakan kriteria berdasarkan keyakinan dan ideologi mereka. kriteria ini memandu aktor saat mengumpulkan dan menganalisis informasi. Mengingat keyakinan dan ideologi aktor, beberapa informasi dianggap lebih penting daripada yang lain (Meseguer, 2005).

1.6.1.1.2. Emulasi

Emulasi terjadi ketika para aktor merevisi posisi kebijakan mereka atas dasar normatif sehingga mereka menganjurkan kebijakan yang serupa dengan kebijakan pelopor. Perbedaan antara emulasi dengan pembelajaran adalah motivasi untuk merevisi posisi kebijakan. Dalam kasus emulasi, motivasi didasarkan pada apa yang disebut dengan logika kesesuaian, sedangkan dalam kasus pembejajaran, didasarkan pada logika kosenkuensi (March dan Olsen, 1989).

Aktor yang mematuhi norma-norma yang menjadi dasar kebijakan pelopor cenderung mempertimbangkan pengenalan kebijakan serupa yang sesuai. Proses ini berlangsung tanpa analisis kemungkinan kosenkuensi dari kebijakan tersebut melainkan karena ator menganggapnya tepat dan sesuai berdasarkan pengamatan yang dangkal. Urutan mekanisme ini adalah, pertama, para aktor dalam yurisdiksi pengikut potensial menjadi sadar akan kebijakan pelopor. Kemudia, karena mereka mematuhi norma-norma umum yang terkait dengan bidang kebijakan masing-masing atau karena mereka memiliki penghargaan yang tinggi terhadap yurisdiksi pelopor, para aktor menganggap kebijakan yang sama sesuai. Hasil dari proses emulasi ini adalah merevisi posisi kebijakan masing-masing aktor sehingga mereka mendukung atau secara aktif mengadvokasi pengenalan kebijakan pengikut yang mirip dengan kebijakan pelopor. Hal ini termasuk peningkatan derajat aktor dalam posisi kebijakannya (Shipan dan Volden, 2008).

Kepemimpinan lingkungan melalui mekasnisme emulasi dapat terjaid terjadi ketika yurisdiksi pepelopor dan calon pengikut mematuhi norma-norma umum atau, atau lebih tepatnya, ketika para aktor dalam yurisdiksi calon pengikut mematuhi norma-norma yang diwakili atau menjadi dasar kebijakan pelopor. Kebijakan pelopor dapat memperkenalkan norma baru yang dapat menyebar ke yurisdiksi lain dan mungkin diterima secara luas, atau dapat didasarkan pada norma bersama yang sudah ada dan menyebar karena dengan norma umum ini dianggap sebagai

kebijakan yang tepat untuk diperkenalkan. Dalam kasus pertama, ketika sebuah norma baru diperkenalkan melalui kebijakan pelopor, norma tersebut dikomunikasikan dan dipromosikan oleh, misalnya, organisasi internasional dan yurisdiksi pelopor (Shipan dan Volden, 2008).

Pada tahap difusi awal, yurisdiksi lain dapat belajar dari norma pelopor ini, menyesuaikan diri dengannya, atau dipaksa untuk menerapkannya. Emulasi juga dapat terjadi pada tahap awal ini berdasarkan penghargaan tinggi yurisdiksi pengikut untuk yurisdiksi pelopor. Setelah sejumlah yurisdiksi memperkenalkan norma, penyebaran norma kemungkinan akan meningkat karena banyaknya yurisdiksi yang telah menerapkan norma mengarah pada pegeseran retorika umum di tingkat internasional. Jika suatu norma telah menyebar luas, ia dapat mencapai tahap internalisasi, yang mana dapat diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat internasional. Hal ini merupakan standar perilaku yang sesuai untuk aktor dengan identitas bersama. Dalam kasus kedua, emulasi terjadi dalam konteks norma-norma umum yang dimiliki yurisdiksi. Jika kebijakan pelopor didasarkan pada norma-norma umum, maka para aktor di yurisdiksi pengikut potensial menganggap pengenalan kebijakan serupa dengan kebijakan pelopor yang tepat dan mendukung penerapannya (Shipan dan Volden, 2008).

1.6.1.1.3. Penyesuaian

Penyesuaian terjadi ketika kebijakan pelopor mengubah konteks kebijakan di yurisdiksi lain, yaitu ketika mengubah biaya dan manfaat dari memperkenalkan kebijakan yang serupa dengan kebijakan pelopor di yurisdiksi pengikut potensial (Simmons dan Elkins, 2004). Aktor kemudian menyesuaikan posisi kebijakan mereka. Urutan mekanisme ini adalah pertama, kebijakan pelopor mempengaruhi situasi ekonomi, lingkungan, atau sosial di yurisdiksi lain. Hal ini bisa melalui resep dengan kebijakan pelopor desain tertentu untuk semua produk yang ditempatkan di

pasar yurisdiksi pelopor. Produsen dari yurisdiksi lain juga harus berinvestasi dalam perubahan desain produk jika mereka ingin terus menjual produk mereka di pasar pelopor. Mengingat investasi dalam perubahan desain produk ini, kepatuhan di yurisdiksi pengikut potensial menjadi lebih murah. Hal ini merupakan perubahan dalam konteks kebijakan dalam yurisdiksi pengikut potensial tersebut (Shipan dan Volden, 2008)..

Kemudian, produsen yang mana sebagai salah satu kelompok aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan melalui upaya advokasi mereka, dapat menyesuaikan posisi kebijakan mereka agar tidak terlalu menentang atau secara aktif menganjurkan pengenalan kebijakan pengikut yang memberlakukan persyaratan produk yang sama dengan kebijakan pelopor. Motivasi ini adalah agar biaya untuk mematuhi persyaratan kebijakan pelopor di yurisdiksi lain diturunkan karena investasi awal dilakukan. Motivasi untuk advokasi aktif kebijakan pengikut yang serupa dengan kebijakan pelopor dapat berupa bahwa produsen berusaha untuk menyamakan kedudukan dengan pesaing domestik mereka yang tidak menjual di pasar pelopor. Dan oleh karena itu belum berinvestasi dalam perubahan produk. Dalam hal ini, produsen yang telah memenuhi persyaratan mengharapkan keunggulan kompetitif atas pesaing mereka di yurisdiksi pengikut potensial yang belum berinvestasi dalam kepatuhan (Kelemen dan Vogel, 2010).

Perubahan biaya dan manfaat memperkenalkan kebijakan pengikut yang serupa dengan kebijakan pelopor juga dapat berhubungan dengan konteks lingkungan. Mengingat pergerakan polusi lintas batas dan sifat global dari banyak permasalahan lingkungan, pengenalan kebijakan pelopor dapat meningkatkan manfaat memperkenalkan kebijakan pengikut karena akumulasi efek kebijakan pelopor bersamaan dengan kebijakan pengikut yang dapat meningkatkan situasi lingkungan secara eksponensial lebih dari pada di kasus yurisdiksi yang bertindak sendiri. Hal ini

dapat menyebabkan penyesuaian posisi kebijakan para aktor untuk mendukung pengenalan kebijakan mengikuti kepemimpinan yurisdiksi pelopor, karena manfaat lingkungan yang diharapkan dapat meningkat (Shipan dan Volden, 2008)..

1.6.2. Tipe Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran diatas, penelitian ini menggunakan tipe eksplanatif dalam mencari hubungan antara dua variabel atau lebih (Silalahi, 2009). Tipe penelitian eksplanatif ini bertujuan untuk menerangkan dan menemukan kausalitas antara variabel-variabel dependen dan independen untuk memahami penyebab suatu kasus. Dalam hal ini peneliti berusaha untuk mengetahui alasan dari pembuatan kebijakan pelarangan impor Tiongkok.

1.6.3. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini berawal tahun 2016 pada saat CCP menerbitkan “*The 13th Five-Year Plan*”, yang mana didalamnya terdapat strategi “*Made in China 2025*” sebagai usaha dalam mentransformasi perindustrian manufaktur Tiongkok. Batas akhir penelitian dipilih pada tahun 2018 sebagai batas tahun terakhir, dikarenakan adanya perkembangan dan *trend* di negara-negara Asia Tenggara untuk mengikuti dan mencontoh dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Tiongkok.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam tulisan ini menggunakan studi kepustakaan dengan mendapatkan data dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer didapatkan oleh penulis melalui pidato dan dokumen pemerintah yang dipublikasian secara resmi oleh pemerintah Tiongkok. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, dan

berita online yang peneliti gunakan dalam menganalisa permasalahan dalam penelitian ini (Bhattacharjee, 2012).

1.6.5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dalam menjawab rumusan masalah. Peneliti memilih metode ini karena dapat digunakan dalam memahami permasalahan yang ada dan menekankan pada interpretasi peneliti berdasarkan analisis data-data yang telah diterima. Melalui metode ini peneliti akan mencoba menemukan kaitan diantara variabel sehingga dapat mengetahui hubungan diantaranya dan mendapatkan sebuah penjelasan

1.6.6. Sistematika Penelitian

Laporan penelitian yang berjudul “Faktor Penyebab Diputuskannya Kebijakan Pelarangan Impor Sampah oleh Pemerintah Tiongkok” terbagi ke dalam lima bab dengan sistematika berikut. Bab pertama akan menjelaskan mengapa penelitian ini diambil yang mengacu pada latar belakang masalah serta rumusan masalah yang dibuat, sehingga menghasilkan sebuah hipotesis. Bab dua menjelaskan dinamika dan proses pembuatan dari kebijakan pelarangan impor sampah Tiongkok. Bab ketiga penulis menjabarkan korelasi antara transformasi industri dengan kebijakan pelarangan impor sampah Tiongkok. Lalu, bab keempat penulis akan menganalisis bagaimana Tiongkok menjadi pemimpin dalam isu lingkungan global model difusi kebijakan menggunakan kebijakan tersebut dan implikasi terhadap aktor-aktor domestik dan global. Terakhir, bab lima berisi kesimpulan penelitian dengan menjelaskan temuan penting penelitian yang kemudian dapat dikembangkan dalam penelitian selanjutnya.